BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Letak Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung pintu gerbang Pulau Sumatera. Sebutan ini layak untuk ibu kota Propinsi Lampung. Kota yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Pada tahun 2001 Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan menjadi 13 kecamatan dan 98 kelurahan. Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara 50º20'-50º30' LS dan 105º28'-105º37' BT dengan luas wilayah 192.96 km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Batas Selatan : Kecamatan Padang Cermin, Ketibung dan Teluk Lampung, Kabupaten Lampung Selatan.

Batas Timur : Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Batas Barat : Kecamatan Gedungtataan dan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kota Bandar Lampung

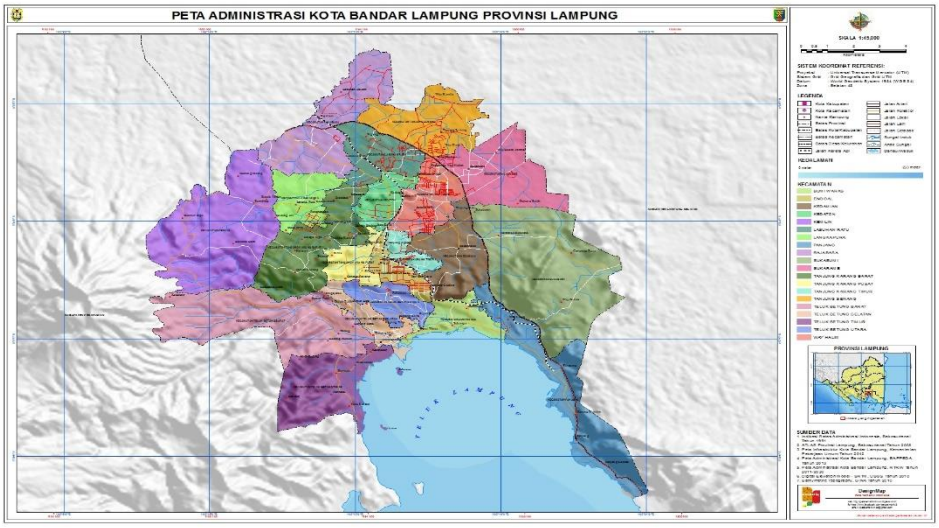

B. Topografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung berada di bagian selatan Propinsi Lampung (Teluk Lampung) dan ujung selatan Pulau Sumatera. 34 Wilayah kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 – 500 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung Selatan dan Panjang.

Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara.

Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang tedapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur-Selatan.

Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Di tengah-tengah mengalir sungai-sungai yaitu Sungai Way Halim, Way Awi, Way Simpur di wilayah Tanjung Karang dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk Betung. Daerah hulu sungai berada di bagian barat, daerah hilir sungai berada di wilayah bagian selatan yaitu pada dataran pantai. Luas wilayah yang datar sampai landai meliputi 60%, landai sampai miring 35% sangat miring sampai curam 4%. Daerah perbukitan atau gunung tersebar pada beberapa kecamatan seperti Gunung Kunyit di Teluk Betung Selatan, Gunung Kelutum, Gunung Camang dan Gunung Kapuk di Tanjung Karang Timur, Gunung Sulah di Sukarame, Gunung Balau di Kedaton, Gunung Sari di Tanjung Karang Pusat, dan Gunung Kucing di Tanjung Karang Barat. Luas wilayah Bandar Lampung 192.96 km2 yang lahannya banyak dimanfaatkan untuk pemukiman dan yang lain berupa sawah, perkebunan dan dataran tinggi.

C. Demografis Kota Bandar Lampung

1. Suku Bangsa

Etnis yang cukup mudah ditemui di kota Bandar Lampung yaituetnis Jawa, Lampung, Sunda, dan Bali. Selain itu terdapat pula etnis Melayu, Minangkabau, Tionghoa, Batak dan lain-lain. Adapun suku/etnis asli (lokal) dari Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung ialah Suku Lampung & Suku Melayu. Suku Lampung dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah Lampung sedangkan suku Melayu lebih sering

mendiami wilayah perbatasan dengan Sumatera Selatan serta daerah-daerah pesisir (Saibatin). Mereka khususnya dapat kita jumpai pada Lampung Barat, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, wilayah Mesuji, Tanggamus, Pesisir Barat, Krui, Bandar Lampung dll

2. Bahasa

Masyarakat Bandar Lampung yang plural menggunakan berbagai bahasa, antara lain: bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Minang, Bahasa Batak dan bahasa setempat yang disebut bahasa Lampung.

3. Penduduk

Pada Tahun 2022, penduduk Bandar Lampung berjumlah 1.051.500 jiwa dengan *sex ratio* 101, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 19.633 jiwa/ km2 , sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 2.609 jiwa/ km2

Diagram 3. 1 Persentasi Penduduk Laki-laki Dan Perempuan

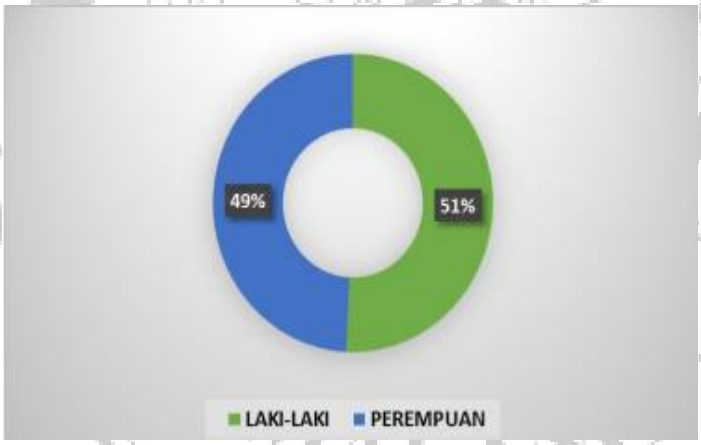

4. Agama

Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 93,57% Masyarakat kota Bandar Lampung. Selain itu juga ada yang beragama Kristen 3,31%, Katolik 1,60%, Hindu 0,28%, Buddha 1,24%, dan Kong Hu Cu kurang dari 0,01% yang rata-rata dianut masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang.

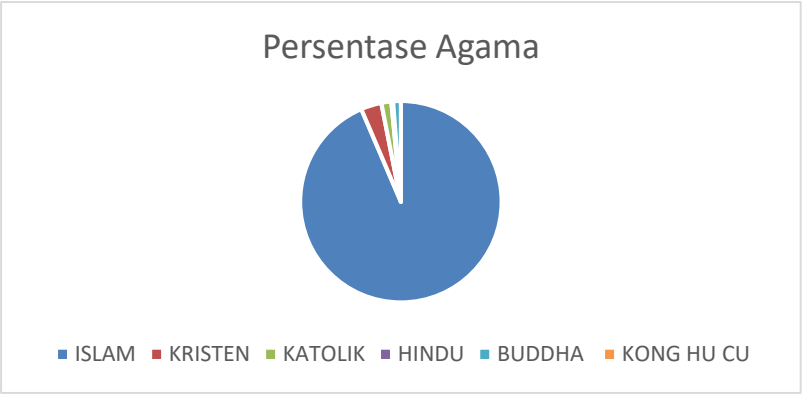

Diagram 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama

5. Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB menurut harga konstan yang dicapai daerah ini pada tahun 20022 sebesar 5.103.379 (dalam jutaan rupiah) dengan konstribusi terbesar datang dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran 19,12%, disusul kemudaian dari sektor bank/ keuangan 17,50%, dan dari sektor industri pengolahan 17,22%. Total nilai ekspor non migas yang dicapai Kota Bandar Lampung hingga tahun 2006 sebesar 4.581.640 ton, dengan konstribusi terbesar datang dari komoditas kopi (140.295 ton), karet (15.005 ton), dan kayu (1524 ton).

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan dengan komoditas utama yang dihasilkan berupa cengkih, kakao, kopi robusta, kelapa dalam, kelapa hibrida. Kontributor utama perekonomian daerah ini adalah disektor industri pengolahan. Terdapat berbagai industri yang bahan bakunya berasal dari bahan tanaman dan perkebunan, industri tersebut sebagian besar merupakan industri rumah tangga yang mengolah kopi, pisang menjadi keripik pisang, dan lada.

Hasil industri ini kemudian menjadi komoditas perdagangan dan ekspor. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. Keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang utuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa.

D. Profil SAMSAT Bandar Lampung

Secara umum SAMSAT di Indonesia lahir pada tahun 1976 melalui Surat Keputusan Bersama tiga Menteri, yaitu Menteri pertahanan, Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri merupakan induk dari semua kebijakan yang berhubungan dengan penanganan masalah SAMSAT. Dalam operasionalisasinya secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor BBNKB dan PT. Jasa Raharja dibidang asuransi Kecelakaan lalu lintas. SAMSAT Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Kantor bersama SAMSAT Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1979 yang merupakan hasil realisasi Kantor Bersama SAMSAT di Indonesia, berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: Kep/13/XII/1979, Nomor: Kep/169/MK/12/1976 dan Nomor 311 tahun 1976. SAMSAT Bandar Lampung melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ).

Tugas pokok SAMSAT Bandar Lampung adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi meliputi Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Tata Laksana Pemungutan PKB dan BBNKB sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku Tata Laksana Pemungutan SWDKLLJ. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi SAMSAT Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek mengenai pelayanan dengan SAMSAT secara terpadu dan terkoordinasiantara Dipenda Provinsi Lampung, POLRI dan PT Jasa Raharja.
b. Menyelenggarakan pelayanan berupa pendaftaran, penetapan, pelaksanaan pungutan yang berkaitan dengan administrasi SAMSAT dan penyerahan hasil pelayanan berupa STNK, BPKB, SPPD, Pening dan Plat Nomor Kendaraan.
c. Pendataan dan pemeriksaan Subyek/Obyek PKB dan BBNKB
d. Menyelenggarakan pengelolaan arsip (penatausahaan pelaksanaan kegiatan)
e. Menyediakan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan pajak di SAMSAT
f. Penagihan piutang PKB dan BBNKB dan penatausahaan penagihan piutang
g. Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan SAMSAT.

Visi SAMSAT Bandar Lampung adalah: "Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah". Hal ini menunjukkan bahwa SAMSAT Bandar Lampung merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang dapat menyumbang bagi pembangunan daerah.

Sedangkan misi yang ditetapkan adalah:

a. Menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung pendapatan daerah
b. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja aparatur secara berkesinambungan

E. Struktur Organisasi SAMSAT Bandar Lampung

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi. Dengan adanya stuktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan. Selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Susunan organisasi SAMSAT Bandar Lampung adalah:

a. Kepala Pungutan PKB dan BBNKB

b. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB

c. Kaur/Petugas Penetapan

d. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB

e. Seksi Pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

f. Bendahara Pembantu Barang Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hierarki dan kewenangan dan tata hubungan laporan. Struktur organisasi Samsat Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

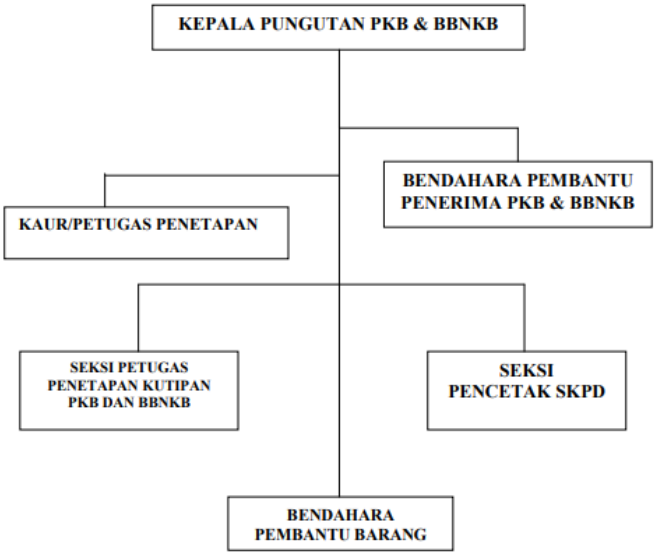

Uraian tugas dalam organisasi Samsat Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pelaksana Pungutan PKB dan BBNKB mempunyai 2 fungsi, yaitu:

(1) Pelaksana teknis operasional dibidang pendapatan daerah.

(2) Penyelenggara pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

b. Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB Tugas pokok dari Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB adalah melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pembantu Penerima PKB dan BBNKB mempunyai fungsi sebagai:

(1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UPTD.

(2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Kaur/Petugas Penetapan Kaur/Petugas Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang penetapan PKB/BBNKB. Dan dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kaur/Petugas Penetapan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

(1) Pelaksanaan pelayanan dibidang penetapan PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan koordinasi tugas pelayanan dibidang penetapan PKB/BBNKB.

(3) Pengendalian tugas pelayanan di bidang penetapan PKB/BBNKB.

d. Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Petugas Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.

(3) Pengendalian tugas pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.

(4) Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksaan tugas pelayanan di bidang Penetapan Kutipan PKB dan BBNKB.

e. Seksi Non Pajak Tugas pokok dari Seksi Pencetak SKDP adalah melaksanakan pelayanan di bidang pencetakan SKDP. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pencetak SKDP mempunyai beberapa fungsi yaitu:

(1) Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang pencetakan SKDP yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan monitoring dalam bidang di bidang pencetakan SKDP

(3) Pengendalian pelayanan di bidang di bidang pencetakan SKDP

f. Bendahara Pembantu Barang Tugas pokok dari Bendahara Pembantu Barang adalah melaksanakan kegiatan operasional UPTD di bidang pencatatan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut, Bendahara Pembantu Barang mempunyai fungsi seperti:

(1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja pencatatan dan inventarisasi, barang di Samsat.

(2) Pelaksanaan administrasi pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat.

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan rencana kerja

pencatatan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan barang di Samsat.

Samsat Bandar Lampung sebagai suatu organisasi merupakan adalah suatu kesatuan kerja yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokkan orang-orang tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab, dan otoritas tertentu. Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki, karena itu menyusun suatu struktur sering diidentifikasikan dengan membuat desain organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG